



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 52 TAHUN 2020


TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 137 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Bersama

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.7/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Walikota Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 137 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 46 Tahun 2020), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kesel. SKPD
		

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran II, pada bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Juli 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 53

Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 1-2

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	1.533.233.546.657	1.530.043.474.657	(3.190.072.000)	0
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	254.252.280.010	254.252.280.010	0	0
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	147.090.000.000	147.090.000.000	0	0
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	41.424.439.000	41.424.439.000	0	0
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.694.280.010	25.694.280.010	0	0
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.043.561.000	40.043.561.000	0	0
4.2.	DANA PERIMBANGAN	989.401.304.000	986.211.232.000	(3.190.072.000)	0
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	170.135.806.000	153.370.027.000	(16.765.779.000)	(10)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	671.766.165.000	671.766.165.000	0	0
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	147.499.333.000	161.075.040.000	13.575.707.000	9
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	289.579.962.647	289.579.962.647	0	0
4.3.1.	Pendapatan Hibah	62.973.000.000	62.973.000.000	0	0
4.3.4.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	53.833.373.000	53.833.373.000	0	0
4.3.5.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	172.773.589.647	172.773.589.647	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.533.233.546.657	1.530.043.474.657	(3.190.072.000)	0
9.	BEBAN	1.868.725.548.277	1.865.535.476.277	(3.190.072.000)	0
5.	BELANJA DAERAH	1.868.725.548.277	1.865.535.476.277	(3.190.072.000)	0
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	876.140.541.207	876.140.541.207	0	0
5.1.1.	Belanja Pegawai	710.266.563.202	710.266.563.202	0	0
5.1.4.	Belanja Hibah	67.735.037.509	67.735.037.509	0	0
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	5.178.000.000	5.178.000.000	0	0
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	92.960.940.496	92.960.940.496	0	0
5.2.	BELANJA LANGSUNG	992.585.007.070	989.394.935.070	(3.190.072.000)	0
5.2.1.	Belanja Pegawai	11.297.350.000	11.297.350.000	0	0
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	570.233.199.104	573.259.636.631	3.026.437.527	1
5.2.3.	Belanja Modal	411.054.457.966	404.837.948.439	(6.216.509.527)	(2)
	JUMLAH BELANJA	1.868.725.548.277	1.865.535.476.277	(3.190.072.000)	0
	SURPLUS/(DEFISIT)	(335.492.001.620)	(335.492.001.620)	0	0
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	335.492.001.620	335.492.001.620	0	0
		335.492.001.620	335.492.001.620	0	0
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	335.492.001.620	335.492.001.620	0	0

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300.000.000.000	300.000.000.000	0	0
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	35.492.001.620	35.492.001.620	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	335.492.001.620	335.492.001.620	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETO	335.492.001.620	335.492.001.620	0	0
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	0	0

Walikota Banjarmasin


 IBNU SINA




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 1-21

Nomor Uru	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	1.533.233.546.657	1.530.043.474.657	(3.190.072.000)	0
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	254.252.280.010	254.252.280.010	0	0
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	147.090.000.000	147.090.000.000	0	0
4.1.1.01.	Pajak Hotel	11.000.000.000	11.000.000.000	0	0
4.1.1.01.01.	Hotel	10.470.900.000	10.470.900.000	0	0
4.1.1.01.03.	Losmen	86.400.000	86.400.000	0	0
4.1.1.01.08.	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	442.700.000	442.700.000	0	0
4.1.1.02.	Pajak Restoran	40.000.000.000	40.000.000.000	0	0
4.1.1.02.01.	Restoran	26.600.100.000	26.600.100.000	0	0
4.1.1.02.02.	Rumah makan	8.053.300.000	8.053.300.000	0	0
4.1.1.02.06.	Bar	3.444.550.000	3.444.550.000	0	0
4.1.1.02.07.	Jasa Boga/Katering	1.902.050.000	1.902.050.000	0	0
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	9.200.000.000	9.200.000.000	0	0
4.1.1.03.01.	Tontonan film/bioskop	3.810.000.000	3.810.000.000	0	0
4.1.1.03.02.	Pagelaran kesenian/musik/tari/busana	242.500.000	242.500.000	0	0
4.1.1.03.05.	Diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya	3.385.315.000	3.385.315.000	0	0
4.1.1.03.07.	Permainan Bilyar, golf, bowling	149.300.000	149.300.000	0	0
4.1.1.03.08.	Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan	1.192.500.000	1.192.500.000	0	0
4.1.1.03.09.	Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center)	414.700.000	414.700.000	0	0
4.1.1.03.10.	Pertandingan Olahraga	5.685.000	5.685.000	0	0
4.1.1.04.	Pajak Reklame	2.860.000.000	2.860.000.000	0	0
4.1.1.04.01.	Reklame papan/billboard/videotron/megatron	2.800.000.000	2.800.000.000	0	0
4.1.1.04.02.	Reklame kain	60.000.000	60.000.000	0	0
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	43.000.000.000	43.000.000.000	0	0

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.1.05.0 2.	Pajak penerangan jalan sumber lain / PLN	43.000.000.000	43.000.000.000	0	0
4.1.1.07.	Pajak Parkir	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
4.1.1.07.0 1.	Pajak parkir	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	330.000.000	330.000.000	0	0
4.1.1.09.0 1.	Pajak sarang burung walet	330.000.000	330.000.000	0	0
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.700.000.000	11.700.000.000	0	0
4.1.1.12.0 1.	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	11.700.000.000	11.700.000.000	0	0
4.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0
4.1.1.13.0 1.	BPHTB-Pemindahan hak	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	41.424.439.000	41.424.439.000	0	0
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	30.095.939.000	30.095.939.000	0	0
4.1.2.01.0 1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.448.939.000	10.448.939.000	0	0
4.1.2.01.0 2.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	12.640.000.000	12.640.000.000	0	0
4.1.2.01.0 5.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0
4.1.2.01.0 6.	Retribusi Pelayanan Pasar	3.680.000.000	3.680.000.000	0	0
4.1.2.01.0 7.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.026.000.000	1.026.000.000	0	0
4.1.2.01.1 2.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	201.000.000	201.000.000	0	0
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	6.980.500.000	6.980.500.000	0	0
4.1.2.02.0 1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000	150.000.000	0	0
4.1.2.02.0 3.	Retribusi Tempat Pelelangan	188.000.000	188.000.000	0	0
4.1.2.02.0 4.	Retribusi Terminal	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
4.1.2.02.0 7.	Retribusi Rumah Potong Hewan	554.500.000	554.500.000	0	0
4.1.2.02.0 8.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	703.000.000	703.000.000	0	0
4.1.2.02.0 9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	385.000.000	385.000.000	0	0
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.348.000.000	4.348.000.000	0	0
4.1.2.03.0 1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
4.1.2.03.0 2.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	240.000.000	240.000.000	0	0
4.1.2.03.0 4.	Retribusi Izin Trayek	42.000.000	42.000.000	0	0

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.2.03.0 7.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	66.000.000	66.000.000	0	0
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.694.280.010	25.694.280.010	0	0
4.1.3.01.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	25.669.280.010	25.669.280.010	0	0
4.1.3.01.0 1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PDAM	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0
4.1.3.01.0 3.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Kal-sel	10.669.280.010	10.669.280.010	0	0
4.1.3.03.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	25.000.000	25.000.000	0	0
4.1.3.03.0 2.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Koperasi	25.000.000	25.000.000	0	0
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.043.561.000	40.043.561.000	0	0
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	25.000.000	25.000.000	0	0
4.1.4.01.0 2.	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	25.000.000	25.000.000	0	0
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	6.625.000.000	6.625.000.000	0	0
4.1.4.03.0 1.	Jasa Giro kas Daerah	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0
4.1.4.03.0 2.	Jasa Giro Bendahara	125.000.000	125.000.000	0	0
4.1.4.04.	Pendapatan Bunga	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0
4.1.4.04.0 1.	Pendapatan Bunga Deposito	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak	485.000.000	485.000.000	0	0
4.1.4.08.0 6.	Pendapatan denda Pajak Hotel	20.000.000	20.000.000	0	0
4.1.4.08.0 7.	Pendapatan denda Pajak Restoran	50.000.000	50.000.000	0	0
4.1.4.08.0 8.	Pendapatan denda Pajak Hiburan	15.000.000	15.000.000	0	0
4.1.4.08.0 9.	Pendapatan denda Pajak Reklame	150.000.000	150.000.000	0	0
4.1.4.08.1 5.	Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	250.000.000	250.000.000	0	0
4.1.4.13.	Pendapatan Dari Pengembalian	560.000.000	560.000.000	0	0
4.1.4.13.0 3.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pemabayaran Gaji dan Tunjangan	30.000.000	30.000.000	0	0
4.1.4.13.0 6.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Taspen dan Sejenisnya	30.000.000	30.000.000	0	0
4.1.4.13.0 7.	Pendapatan Dari Pengembalian Hasil Temuan Pemeriksaan	500.000.000	500.000.000	0	0
4.1.4.18.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	34.500.000	34.500.000	0	0
4.1.4.18.0 1.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	34.500.000	34.500.000	0	0
4.1.4.20.	Pendapatan BLUD	1.848.210.428	1.848.210.428	0	0

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.4.20.0 1.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.848.210.428	1.848.210.428	0	0
4.1.4.22. 1.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	15.465.850.572	15.465.850.572	0	0
4.1.4.22.0 1.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.	807.000.000	807.000.000	0	0
4.1.4.22.0 4.	Penerimaan Hak Penempatan Pasar	530.000.000	530.000.000	0	0
4.1.4.22.0 5.	Penerimaan Tunggakan Retribusi Daerah	1.358.000.000	1.358.000.000	0	0
4.1.4.22.0 8.	Penerimaan Pemanfaatan Fasilitas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	127.500.000	127.500.000	0	0
4.1.4.22.1 0.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teluk Tiram	452.980.781	452.980.781	0	0
4.1.4.22.1 1.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pelambuan	685.754.734	685.754.734	0	0
4.1.4.22.1 2.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Banjarmasin Indah	264.373.480	264.373.480	0	0
4.1.4.22.1 3.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teluk Dalam	679.671.782	679.671.782	0	0
4.1.4.22.1 4.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cempaka Putih	672.047.479	672.047.479	0	0
4.1.4.22.1 5.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sungai Mesa	287.033.156	287.033.156	0	0
4.1.4.22.1 6.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas 9 November	416.038.200	416.038.200	0	0
4.1.4.22.1 7.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sungai Bilu	389.618.129	389.618.129	0	0
4.1.4.22.1 8.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pekapuran Raya	265.104.693	265.104.693	0	0
4.1.4.22.1 9.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Mekar	260.672.332	260.672.332	0	0
4.1.4.22.2 0.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Terminal	574.758.524	574.758.524	0	0
4.1.4.22.2 1.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gedang Hanyar	322.723.889	322.723.889	0	0
4.1.4.22.2 2.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas S. Parman	553.661.964	553.661.964	0	0
4.1.4.22.2 3.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kayu Tangi	754.241.616	754.241.616	0	0
4.1.4.22.2 4.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sungai Jingah	467.115.791	467.115.791	0	0
4.1.4.22.2 5.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kuin Raya	574.232.605	574.232.605	0	0
4.1.4.22.2 6.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Alalak Tengah	535.998.504	535.998.504	0	0
4.1.4.22.2 7.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Alalak Selatan	745.568.978	745.568.978	0	0
4.1.4.22.2 8.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pekauman	1.010.687.539	1.010.687.539	0	0
4.1.4.22.3 0.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pemurus Dalam	453.392.376	453.392.376	0	0

Kabag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.4.22.3 1.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Basirih Baru	500.793.301	500.793.301	0	0
4.1.4.22.3 2.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kelayan Dalam	459.373.235	459.373.235	0	0
4.1.4.22.3 3.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pemurus Baru	543.907.384	543.907.384	0	0
4.1.4.22.3 4.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Beruntung Jaya	283.100.100	283.100.100	0	0
4.1.4.22.3 5	Penerimaan pemanfaatan Rusunawa	490.500.000	490.500.000	0	0
4.2.	DANA PERIMBANGAN	989.401.304.000	986.211.232.000	(3.190.072.000)	0
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	170.135.806.000	153.370.027.000	(16.765.779.000)	(10)
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	45.508.006.000	44.184.213.000	(1.323.793.000)	(3)
4.2.1.01.0 1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4.079.668.000	4.079.668.000	0	0
4.2.1.01.0 4.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	41.428.121.000	40.104.329.000	(1.323.792.000)	(3)
4.2.1.01.0 5.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	217.000	216.000	(1.000)	0
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	124.627.800.000	109.185.814.000	(15.441.986.000)	(12)
4.2.1.02.0 2.	Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan	114.450.000	114.450.000	0	0
4.2.1.02.0 5.	Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti)	122.833.983.000	107.391.997.000	(15.441.986.000)	(13)
4.2.1.02.0 7.	Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan	1.418.361.000	1.418.361.000	0	0
4.2.1.02.0 8.	Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi	261.006.000	261.006.000	0	0
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	671.766.165.000	671.766.165.000	0	0
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU)	671.766.165.000	671.766.165.000	0	0
4.2.2.01.0 1.	Dana Alokasi Umum.	671.766.165.000	671.766.165.000	0	0
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	147.499.333.000	161.075.040.000	13.575.707.000	9
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus (DAK) .	21.119.928.000	28.635.635.000	7.515.707.000	36
4.2.3.01.0 1.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0	6.205.374.000	6.205.374.000	0
4.2.3.01.0 5.	DAK Bidang Keluarga Berencana	437.000.000	437.000.000	0	0
4.2.3.01.0 7.	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0	1.310.333.000	1.310.333.000	0
4.2.3.01.0 8.	DAK Bidang Kesehatan	4.902.447.000	4.902.447.000	0	0
4.2.3.01.1 3.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	1.855.249.000	1.855.249.000	0	0
4.2.3.01.1 8.	DAK Bidang Pendidikan	13.925.232.000	13.925.232.000	0	0
4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	126.379.405.000	132.439.405.000	6.060.000.000	5
4.2.3.02.0 1.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	89.570.585.000	89.570.585.000	0	0

Bag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.3.02.0 2.	Tambahan Penghasilan Profesi Guru PNSD	21.975.000	21.975.000	0	0
4.2.3.02.0 3.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11.500.800.000	11.500.800.000	0	0
4.2.3.02.0 4.	Bantuan Operasional Kesehatan	13.637.443.000	19.697.443.000	6.060.000.000	44
4.2.3.02.0 5.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	4.959.400.000	4.959.400.000	0	0
4.2.3.02.0 6.	Akreditasi Puskesmas	1.616.520.000	1.616.520.000	0	0
4.2.3.02.0 7.	Jaminan Persalinan	726.306.000	726.306.000	0	0
4.2.3.02.0 8.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB)	1.522.622.000	1.522.622.000	0	0
4.2.3.02.0 9.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.150.526.000	2.150.526.000	0	0
4.2.3.02.1 1.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000	417.358.000	0	0
4.2.3.02.1 2.	Dana Pelayanan Kepariwisataa	255.870.000	255.870.000	0	0
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	289.579.962.647	289.579.962.647	0	0
4.3.1.	Pendapatan Hibah	62.973.000.000	62.973.000.000	0	0
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	62.973.000.000	62.973.000.000	0	0
4.3.1.01.0 1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah.	62.973.000.000	62.973.000.000	0	0
4.3.4.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	53.833.373.000	53.833.373.000	0	0
4.3.4.03.	Dana Penyesuaian	53.833.373.000	53.833.373.000	0	0
4.3.4.03.0 3.	Dana Insentif Daerah	53.833.373.000	53.833.373.000	0	0
4.3.5.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	172.773.589.647	172.773.589.647	0	0
4.3.5.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	172.773.589.647	172.773.589.647	0	0
4.3.5.01.0 1.	Pendapatan Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor	59.798.184.542	59.798.184.542	0	0
4.3.5.01.0 2.	Pendapatan Bagi hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.417.411.839	18.417.411.839	0	0
4.3.5.01.0 3.	Pendapatan Bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	79.397.071.663	79.397.071.663	0	0
4.3.5.01.0 4.	Pendapatan Bagi hasil Pajak Air Permukaan	75.365.913	75.365.913	0	0
4.3.5.01.0 5.	Pendapatan Bagi hasil Pajak Rokok	15.085.555.690	15.085.555.690	0	0
9.	JUMLAH PENDAPATAN	1.533.233.546.657	1.530.043.474.657	(3.190.072.000)	0
5.	BEBAN	1.868.725.548.277	1.865.535.476.277	(3.190.072.000)	0
5.1.	BELANJA DAERAH	1.868.725.548.277	1.865.535.476.277	(3.190.072.000)	0
5.1.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	876.140.541.207	876.140.541.207	0	0
5.1.1.1.	Belanja Pegawai	710.266.563.202	710.266.563.202	0	0
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	493.832.679.787	493.832.679.787	0	0

Bag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SHPD

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.0 1.	Gaji pokok PNS/uang representasi	290.262.232.659	290.262.232.659	0	0
5.1.1.01.0 2.	Tunjangan keluarga	27.794.167.086	27.794.167.086	0	0
5.1.1.01.0 3.	Tunjangan jabatan	10.154.165.611	10.154.165.611	0	0
5.1.1.01.0 4.	Tunjangan fungsional	17.341.421.233	17.341.421.233	0	0
5.1.1.01.0 5.	Tunjangan fungsional umum	3.810.785.993	3.810.785.993	0	0
5.1.1.01.0 6.	Tunjangan beras	14.040.379.865	14.040.379.865	0	0
5.1.1.01.0 7.	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	10.161.897.725	10.161.897.725	0	0
5.1.1.01.0 8.	Pembulatan gaji	8.825.542	8.825.542	0	0
5.1.1.01.1 0.	Uang paket	86.058.000	86.058.000	0	0
5.1.1.01.1 1.	Tunjangan badan musyawarah	31.865.925	31.865.925	0	0
5.1.1.01.1 2.	Tunjangan komisi	56.208.000	56.208.000	0	0
5.1.1.01.1 3.	Tunjangan badan anggaran	29.414.700	29.414.700	0	0
5.1.1.01.1 4.	Tunjangan badan kehormatan	20.279.700	20.279.700	0	0
5.1.1.01.1 5.	Tunjangan alat kelengkapan lainnya	186.628.050	186.628.050	0	0
5.1.1.01.1 6.	Tunjangan perumahan	6.722.500.000	6.722.500.000	0	0
5.1.1.01.1 8.	Uang jasa pengabdian	430.290.000	430.290.000	0	0
5.1.1.01.1 9.	Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD	805.339.350	805.339.350	0	0
5.1.1.01.2 2.	Dana tambahan tunjangan profesi guru	89.570.585.000	89.570.585.000	0	0
5.1.1.01.2 3.	Dana tambahan penghasilan guru	21.975.000	21.975.000	0	0
5.1.1.01.2 4.	Dana jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	19.947.660.348	19.947.660.348	0	0
5.1.1.01.2 5.	Dana jaminan kecelakaan kerja dan kematian	2.350.000.000	2.350.000.000	0	0
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	198.379.544.817	198.379.544.817	0	0
5.1.1.02.0 1.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	185.295.211.465	185.295.211.465	0	0
5.1.1.02.0 6.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	13.084.333.352	13.084.333.352	0	0
5.1.1.03.	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	16.913.500.000	16.913.500.000	0	0
5.1.1.03.0 1.	Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD	7.938.000.000	7.938.000.000	0	0

Yang Berhormat,

Nomor Uru	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.03.0 2.	Belanja penunjang operasional KDH/WKDH	841.000.000	841.000.000	0	0
5.1.1.03.0 3.	Belanja penunjang transportasi pimpinan dan anggota DPRD	6.150.000.000	6.150.000.000	0	0
5.1.1.03.0 4.	Tunjangan Reses	1.984.500.000	1.984.500.000	0	0
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	966.555.000	966.555.000	0	0
5.1.1.05.0 1.	Insentif pemungutan pajak daerah	966.555.000	966.555.000	0	0
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	174.283.598	174.283.598	0	0
5.1.1.06.0 1.	Insentif pemungutan retribusi daerah	174.283.598	174.283.598	0	0
5.1.4.	Belanja Hibah	67.735.037.509	67.735.037.509	0	0
5.1.4.05.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	12.410.900.000	12.410.900.000	0	0
5.1.4.05.0 1.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	1.980.900.000	1.980.900.000	0	0
5.1.4.05.0 2.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang pendidikan dan penelitian	451.000.000	451.000.000	0	0
5.1.4.05.0 3.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang kepemudaan dan olah raga	7.454.000.000	7.454.000.000	0	0
5.1.4.05.0 6.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan pemangkuan dan panti	100.000.000	100.000.000	0	0
5.1.4.05.0 8.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang penyiaran dan promosi daerah	400.000.000	400.000.000	0	0
5.1.4.05.1 1.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang swasta non profesi	700.000.000	700.000.000	0	0
5.1.4.05.1 2.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Palang Merah Indonesia (PMI)	650.000.000	650.000.000	0	0
5.1.4.05.1 3.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Pramuka	675.000.000	675.000.000	0	0
5.1.4.07.	Belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	37.727.859.620	37.727.859.620	0	0
5.1.4.07.0 1.	Belanja hibah kepada KPU Kota banjarmasin	19.348.918.620	19.348.918.620	0	0
5.1.4.07.0 2.	Belanja hibah kepada Panwaslu kota banjarmasin	9.007.490.000	9.007.490.000	0	0
5.1.4.07.0 3.	Belanja Hibah Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9.371.451.000	9.371.451.000	0	0
5.1.4.08.	Belanja Hibah Operasional Dana Alokasi Khusus Non Fisik	16.460.200.000	16.460.200.000	0	0
5.1.4.08.0 1.	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada Masyarakat/Swasta	11.500.800.000	11.500.800.000	0	0
5.1.4.08.0 2.	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan	4.959.400.000	4.959.400.000	0	0
5.1.4.09.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.136.077.889	1.136.077.889	0	0

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.4.09.0 2.	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Gerindra	159.048.471	159.048.471	0	0
5.1.4.09.0 3.	Belanja bantuan keuangan kepada Partai PPP	63.850.203	63.850.203	0	0
5.1.4.09.0 4.	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Golkar	140.461.598	140.461.598	0	0
5.1.4.09.0 5.	Belanja bantuan keuangan kepada Partai PKS	131.947.992	131.947.992	0	0
5.1.4.09.0 6.	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Bulan Bintang	23.339.596	23.339.596	0	0
5.1.4.09.0 7.	Belanja bantuan keuangan kepada Partai PKB	122.881.315	122.881.315	0	0
5.1.4.09.0 8.	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Demokrat	77.352.510	77.352.510	0	0
5.1.4.09.0 9.	Belanja bantuan keuangan kepada Partai NasDem	57.117.486	57.117.486	0	0
5.1.4.09.1 0.	Belanja bantuan keuangan kepada Partai PAN	221.169.406	221.169.406	0	0
5.1.4.09.1 1.	Belanja bantuan keuangan kepada Partai PDI Perjuangan	138.909.312	138.909.312	0	0
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	5.178.000.000	5.178.000.000	0	0
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.178.000.000	2.178.000.000	0	0
5.1.5.03.0 1.	Belanja bantuan sosial kepada anggota kemasyarakatan	153.000.000	153.000.000	0	0
5.1.5.03.0 3.	Belanja Bantuan Sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
5.1.5.03.0 9.	Belanja Bantuan Sosial Itsbat Nikah	25.000.000	25.000.000	0	0
5.1.5.04.	Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0
5.1.5.04.0 4.	Belanja bantuan sosial tidak direncanakan	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	92.960.940.496	92.960.940.496	0	0
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	92.960.940.496	92.960.940.496	0	0
5.1.8.01.0 1.	Belanja tidak terduga	92.960.940.496	92.960.940.496	0	0
5.2.	BELANJA LANGSUNG	992.585.007.070	989.394.935.070	(3.190.072.000)	0
5.2.1.	Belanja Pegawai	11.297.350.000	11.297.350.000	0	0
5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.846.600.000	1.846.600.000	0	0
5.2.1.01.0 1.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.230.600.000	1.230.600.000	0	0
5.2.1.01.0 2.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	616.000.000	616.000.000	0	0
5.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	9.445.950.000	9.445.950.000	0	0
5.2.1.04.0 2.	Belanja Pegawai Dana BOS APBN	9.445.950.000	9.445.950.000	0	0
5.2.1.06.	Honorarium Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.800.000	4.800.000	0	0
5.2.1.06.0 1.	Honorarium Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.	4.800.000	4.800.000	0	0

Kep. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	570.233.199.104	573.259.636.631	3.026.437.527	1
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.912.704.946	36.910.104.946	(2.600.000)	0
5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	2.934.301.225	2.934.301.225	0	0
1.					
5.2.2.01.0	Belanja alat listrik dan elektronik	4.165.584.700	4.165.584.700	0	0
3.					
5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	414.537.000	414.537.000	0	0
4.					
5.2.2.01.0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.212.910.300	2.212.910.300	0	0
5.					
5.2.2.01.0	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	46.600.000	46.600.000	0	0
6.					
5.2.2.01.0	Belanja pengisian tabung gas	386.196.400	386.196.400	0	0
7.					
5.2.2.01.0	Belanja Dokumentasi	305.017.800	305.017.800	0	0
8.					
5.2.2.01.0	Belanja Buku/Modul Peraturan	20.000.000	20.000.000	0	0
9.					
5.2.2.01.1	Belanja Spanduk & Publikasi	7.671.345.700	7.668.745.700	(2.600.000)	0
0.					
5.2.2.01.1	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.089.018.921	15.089.018.921	0	0
1.					
5.2.2.01.1	Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer	1.177.834.900	1.177.834.900	0	0
2.					
5.2.2.01.1	Belanja Pakai Habis Pakaian dan Atribut Upacara/Acara Nasional dan/atau Daerah	2.489.358.000	2.489.358.000	0	0
3.					
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	43.273.300.211	40.059.094.211	(3.214.206.000)	(7)
5.2.2.02.0	Belanja bahan baku bangunan	115.750.000	115.750.000	0	0
1.					
5.2.2.02.0	Belanja bahan/bibit tanaman	607.472.386	607.472.386	0	0
2.					
5.2.2.02.0	Belanja bahan obat-obatan	15.102.615.000	13.079.315.000	(2.023.300.000)	(13)
4.					
5.2.2.02.0	Belanja bahan kimia	6.902.938.000	5.748.777.000	(1.154.161.000)	(17)
5.					
5.2.2.02.0	Belanja Persediaan Makanan Pokok	4.341.971.100	4.341.971.100	0	0
6.					
5.2.2.02.0	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan	4.515.839.230	4.496.344.230	(19.495.000)	0
7.					
5.2.2.02.0	Belanja Bahan Praktek	3.273.963.450	3.256.713.450	(17.250.000)	(1)
8.					
5.2.2.02.0	Belanja Bibit Ikan	52.200.000	52.200.000	0	0
9.					
5.2.2.02.1	Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	1.398.775.545	1.398.775.545	0	0
0.					
5.2.2.02.1	Belanja Bahan Baku Kerumahtanggaan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	490.000.000	490.000.000	0	0
1.					
5.2.2.02.1	Belanja Rambu Lalu Lintas Jalan	139.961.000	139.961.000	0	0
2.					
5.2.2.02.1	Belanja Alat-Alat Kesehatan	6.331.814.500	6.331.814.500	0	0
3.					

Wakil Gubernur	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	220.032.260.028	220.061.233.028	28.973.000	0
5.2.2.03.0	Belanja telepon	1.496.981.000	1.496.981.000	0	0
1.					
5.2.2.03.0	Belanja air	1.634.666.400	1.634.666.400	0	0
2.					
5.2.2.03.0	Belanja listrik	23.956.739.900	23.956.739.900	0	0
3.					
5.2.2.03.0	Belanja surat kabar/majalah	850.715.000	850.715.000	0	0
4.					
5.2.2.03.0	Belanja paket/pengiriman	93.800.000	93.800.000	0	0
6.					
5.2.2.03.0	Belanja sertifikasi	149.000.000	149.000.000	0	0
7.					
5.2.2.03.0	Belanja Jasa Internet	4.739.114.000	4.739.114.000	0	0
8.					
5.2.2.03.1	Belanja jasa administrasi penyampaian SPPT PBB	523.840.000	523.840.000	0	0
1.					
5.2.2.03.1	Belanja jasa pembuatan laporan	10.400.154.300	10.400.154.300	0	0
3.					
5.2.2.03.1	Belanja jasa penilaian aset	222.050.000	222.050.000	0	0
6.					
5.2.2.03.1	Belanja Jasa Pembuatan Stand & Dekorasi	855.700.800	855.700.800	0	0
7.					
5.2.2.03.1	Belanja jasa pembuatan film dokumenter	300.850.000	300.850.000	0	0
8.					
5.2.2.03.1	Belanja jasa penginputan data	427.875.000	427.875.000	0	0
9.					
5.2.2.03.2	Belanja jasa kalibrasi	379.650.000	379.650.000	0	0
0.					
5.2.2.03.2	Belanja jasa pemeriksaan laboratorium	745.257.000	745.257.000	0	0
1.					
5.2.2.03.2	Belanja jasa non borongan	3.831.299.500	3.862.272.500	30.973.000	1
2.					
5.2.2.03.2	Belanja jasa administrasi perpanjangan izin senjata api	15.750.000	15.750.000	0	0
3.					
5.2.2.03.2	Belanja jasa pelayanan kantor	136.431.708.428	136.431.708.428	0	0
4.					
5.2.2.03.2	Belanja jasa KIR non kendaraan	2.800.000	2.800.000	0	0
5.					
5.2.2.03.2	Belanja Jasa KIR	61.045.000	61.045.000	0	0
6.					
5.2.2.03.2	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	899.164.000	899.164.000	0	0
7.					
5.2.2.03.2	Belanja jasa penggantian pelayanan kesehatan	31.364.320.700	31.362.320.700	(2.000.000)	0
9.					
5.2.2.03.3	Belanja keikutsertaan pameran	584.879.000	584.879.000	0	0
1.					
5.2.2.03.3	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Biaya Transfer Antar Bank)	64.900.000	64.900.000	0	0
2.					
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	80.400.000	80.400.000	0	0

Dis. Perencanaan	Revisi	Revisi

6

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.04.0 2.	Belanja premi asuransi barang milik daerah	80.400.000	80.400.000	0	0
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.370.094.700	8.370.094.700	0	0
5.2.2.05.0 1.	Belanja jasa service dan penggantian suku cadang	5.874.916.700	5.874.916.700	0	0
5.2.2.05.0 2.	Belanja penggantian suku cadang (Dinas Lingkungan Hidup)	2.495.178.000	2.495.178.000	0	0
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.601.242.957	9.088.314.037	(512.928.920)	(5)
5.2.2.06.0 1.	Belanja cetak	7.000.790.070	6.498.506.550	(502.283.520)	(7)
5.2.2.06.0 2.	Belanja penggandaan	2.600.452.887	2.589.807.487	(10.645.400)	0
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.622.323.920	1.632.323.920	10.000.000	1
5.2.2.07.0 1.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	220.000.000	220.000.000	0	0
5.2.2.07.0 2.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	916.467.420	926.467.420	10.000.000	1
5.2.2.07.0 3.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	451.300.000	451.300.000	0	0
5.2.2.07.0 5.	Belanja sewa lahan	5.000.000	5.000.000	0	0
5.2.2.07.0 6.	Belanja sewa stan pameran	29.556.500	29.556.500	0	0
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	952.000.000	952.000.000	0	0
5.2.2.08.0 1.	Belanja sewa sarana mobilitas darat	945.000.000	945.000.000	0	0
5.2.2.08.0 2.	Belanja sewa sarana mobilitas air	7.000.000	7.000.000	0	0
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.395.667.000	3.306.837.000	(88.830.000)	(3)
5.2.2.10.0 1.	Belanja sewa meja kursi	479.937.000	479.937.000	0	0
5.2.2.10.0 2.	Belanja sewa komputer dan printer	365.000.000	365.000.000	0	0
5.2.2.10.0 4.	Belanja sewa generator	89.440.000	89.440.000	0	0
5.2.2.10.0 5.	Belanja sewa tenda	879.023.000	879.023.000	0	0
5.2.2.10.0 6.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	11.700.000	11.700.000	0	0
5.2.2.10.0 7.	Belanja sewa peralatan audio dan komunikasi	515.979.000	515.979.000	0	0
5.2.2.10.0 9.	Belanja sewa AC	57.585.000	57.585.000	0	0
5.2.2.10.1 1.	Belanja sewa OS/hardware/software/jaringan komputer dan lainnya	382.500.000	293.670.000	(88.830.000)	(23)
5.2.2.10.1 2.	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	614.503.000	614.503.000	0	0
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.715.023.976	25.602.353.976	(112.670.000)	0

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.0	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.677.234.200	7.677.234.200	0	0
1.					
5.2.2.11.0	Belanja makanan dan minuman rapat	5.731.446.476	5.752.446.476	21.000.000	0
2.					
5.2.2.11.0	Belanja makanan dan minuman tamu	2.105.337.500	2.105.337.500	0	0
3.					
5.2.2.11.0	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.901.211.800	9.767.541.800	(133.670.000)	(1)
4.					
5.2.2.11.0	Belanja makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh	249.794.000	249.794.000	0	0
5.					
5.2.2.11.0	Belanja makan dan minum harian KDH dan WKDH	50.000.000	50.000.000	0	0
6.					
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	982.320.000	982.320.000	0	0
5.2.2.12.0	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH	37.500.000	37.500.000	0	0
1.					
5.2.2.12.0	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	180.780.000	180.780.000	0	0
2.					
5.2.2.12.0	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	186.280.000	186.280.000	0	0
3.					
5.2.2.12.0	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	167.100.000	167.100.000	0	0
4.					
5.2.2.12.0	Belanja pakaian dinas sipil resmi (PSR)	231.630.000	231.630.000	0	0
6.					
5.2.2.12.0	Belanja kelengkapan atribut pakalan dinas	179.030.000	179.030.000	0	0
7.					
5.2.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	137.240.000	137.240.000	0	0
5.2.2.13.0	Belanja pakaian kerja lapangan	34.190.000	34.190.000	0	0
1.					
5.2.2.13.0	Belanja Pakalan Petugas Penyemprotan	79.450.000	79.450.000	0	0
3.					
5.2.2.13.0	Belanja Pakalan Kerja Pelayanan	23.600.000	23.600.000	0	0
4.					
5.2.2.14.	Belanja Pakalan Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.135.605.000	1.135.605.000	0	0
5.2.2.14.0	Belanja pakaian adat daerah	155.660.000	155.660.000	0	0
2.					
5.2.2.14.0	Belanja pakaian batik tradisional	979.945.000	979.945.000	0	0
3.					
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.501.360.204	88.228.669.651	(272.690.553)	0
5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah PNS	2.181.300.000	2.181.300.000	0	0
1.					
5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Non PNS	19.284.238.000	19.129.238.000	(155.000.000)	(1)
2.					
5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah PNS	22.259.679.736	22.141.989.183	(117.690.553)	(1)
3.					
5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah Non PNS	40.368.494.068	40.368.494.068	0	0
4.					
5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi PNS	2.195.628.200	2.195.628.200	0	0
5.					
5.2.2.15.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Non PNS	1.339.495.200	1.339.495.200	0	0
6.					

Revisi Perencanaan

--	--	--

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.0 7.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	872.525.000	872.525.000	0	0
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	22.847.973.400	22.847.973.400	0	0
5.2.2.18.0 2.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.131.361.500	4.131.361.500	0	0
5.2.2.18.0 3.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.606.062.900	11.606.062.900	0	0
5.2.2.18.0 4.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.025.258.000	7.025.258.000	0	0
5.2.2.18.0 5.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	85.291.000	85.291.000	0	0
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	805.400.000	805.400.000	0	0
5.2.2.19.0 1.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	805.400.000	805.400.000	0	0
5.2.2.20.	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.179.920.000	3.159.110.000	(20.810.000)	(1)
5.2.2.20.0 1.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.810.847.000	2.810.847.000	0	0
5.2.2.20.0 2.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	369.073.000	348.263.000	(20.810.000)	(6)
5.2.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	322.200.000	322.200.000	0	0
5.2.2.22.0 2.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	94.000.000	94.000.000	0	0
5.2.2.22.0 3.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	125.000.000	125.000.000	0	0
5.2.2.22.0 4.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	103.200.000	103.200.000	0	0
5.2.2.23.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.225.991.300	5.225.991.300	0	0
5.2.2.23.0 4.	Belanja Kepesertaan	3.589.363.300	3.589.363.300	0	0
5.2.2.23.0 5.	Belanja Pendidikan dan Pelatihan (BKD)	1.636.628.000	1.636.628.000	0	0
5.2.2.24.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.117.800.000	3.342.550.000	1.224.750.000	58
5.2.2.24.0 1.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga.	518.900.000	483.650.000	(35.250.000)	(7)
5.2.2.24.0 2.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	1.598.900.000	2.858.900.000	1.260.000.000	79
5.2.2.25.	Belanja Barang Hibah kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.305.100.000	1.305.100.000	0	0
5.2.2.25.0 1.	Belanja Barang Hibah kepada Pihak Ketiga.	1.305.100.000	1.305.100.000	0	0
5.2.2.26.	Belanja Barang Bantuan Sosial Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.090.300.000	3.090.300.000	0	0
5.2.2.26.0 2.	Belanja Barang Bantuan Sosial Kepada Pihak Masyarakat	3.090.300.000	3.090.300.000	0	0
5.2.2.27.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	39.495.650.000	39.495.650.000	0	0
5.2.2.27.0 2.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS APBN	39.495.650.000	39.495.650.000	0	0

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.30.	Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Petugas Acara lainnya	13.299.060.500	13.226.510.500	(72.550.000)	(1)
5.2.2.30.0	Jasa PNS (Pegawai Negeri Sipil)	2.204.755.000	2.214.955.000	10.200.000	0
1.					
5.2.2.30.0	Jasa Non PNS (Bukan Pegawai Negeri Sipil)	11.094.305.500	11.011.555.500	(82.750.000)	(1)
2.					
5.2.2.31.	Belanja Barang dan Jasa Dana JKN	14.221.831.723	14.221.831.723	0	0
5.2.2.31.0	Belanja Barang dan Jasa Dana JKN.	14.221.831.723	14.221.831.723	0	0
1.					
5.2.2.32.	Belanja Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus Non Fisik	20.487.064.000	26.547.064.000	6.060.000.000	30
5.2.2.32.0	Belanja Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus Non Fisik.	20.487.064.000	26.547.064.000	6.060.000.000	30
1.					
5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.123.365.239	3.123.365.239	0	0
5.2.2.34.0	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	3.123.365.239	3.123.365.239	0	0
1.					
5.2.3.	Belanja Modal	411.054.457.966	404.837.948.439	(6.216.509.527)	(2)
5.2.3.01.	Belanja Modal Tanah	13.970.989.895	13.970.989.895	0	0
5.2.3.01.2	Belanja modal pengadaan Tanah Pengguna Lain	11.315.364.895	11.315.364.895	0	0
2.					
5.2.3.01.2	Belanja modal pengadaan tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	67.800.000	67.800.000	0	0
6.					
5.2.3.01.2	Belanja modal pengadaan Tanah Kosong	181.750.000	181.750.000	0	0
7.					
5.2.3.01.3	Belanja modal pengadaan Tanah Bangunan jalan dan Jembatan	510.000.000	510.000.000	0	0
0.					
5.2.3.01.3	Belanja modal pengadaan tanah Lapangan Penimbun Barang	1.896.075.000	1.896.075.000	0	0
5.					
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar Darat	7.298.369.000	7.298.369.000	0	0
5.2.3.02.0	Belanja modal pengadaan Grader	1.988.750.000	1.988.750.000	0	0
2.					
5.2.3.02.0	Belanja modal pengadaan Hauler	2.709.669.000	2.709.669.000	0	0
5.					
5.2.3.02.0	Belanja modal pengadaan Compacting Equipment	2.599.950.000	2.599.950.000	0	0
7.					
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	5.352.263.900	5.352.263.900	0	0
5.2.3.04.0	Belanja modal pengadaan Electric Generating Set	66.750.000	66.750.000	0	0
4.					
5.2.3.04.0	Belanja modal pengadaan Pompa	207.303.900	207.303.900	0	0
5.					
5.2.3.04.0	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengelolaan Air Kotor	5.078.210.000	5.078.210.000	0	0
8.					
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.095.200.000	7.095.200.000	0	0
5.2.3.05.0	Belanja modal pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	3.665.450.000	3.665.450.000	0	0
2.					
5.2.3.05.0	Belanja modal pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan barang	881.650.000	881.650.000	0	0
3.					

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.05.0 4.	Belanja modal pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.160.750.000	2.160.750.000	0	0
5.2.3.05.0 5.	Belanja modal pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	151.700.000	151.700.000	0	0
5.2.3.05.0 6.	Belanja modal pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	235.650.000	235.650.000	0	0
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	23.650.000	23.650.000	0	0
5.2.3.10.0 3.	Belanja modal pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	5.500.000	5.500.000	0	0
5.2.3.10.0 6.	Belanja modal pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	18.150.000	18.150.000	0	0
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	5.500.000	5.500.000	0	0
5.2.3.11.0 5.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Standa (Standart Tool)	3.000.000	3.000.000	0	0
5.2.3.11.0 7.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	1.000.000	1.000.000	0	0
5.2.3.11.0 8.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Besi	1.500.000	1.500.000	0	0
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	248.700.000	248.700.000	0	0
5.2.3.12.0 9.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	248.700.000	248.700.000	0	0
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	200.050.000	200.050.000	0	0
5.2.3.13.0 9.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penampung Sampah	200.050.000	200.050.000	0	0
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	19.437.800	19.437.800	0	0
5.2.3.14.0 1.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman.	3.350.000	3.350.000	0	0
5.2.3.14.0 3.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan	16.087.800	16.087.800	0	0
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	3.485.557.455	3.331.107.455	(154.450.000)	(4)
5.2.3.16.0 1.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	8.000.000	8.000.000	0	0
5.2.3.16.0 3.	Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	60.000.000	60.000.000	0	0
5.2.3.16.0 4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1.970.898.250	1.969.248.250	(1.650.000)	0
5.2.3.16.0 5.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.446.659.205	1.293.859.205	(152.800.000)	(11)
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.461.786.100	3.376.786.100	(8.085.000.000)	(71)
5.2.3.17.0 1.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	1.424.906.800	1.424.906.800	0	0
5.2.3.17.0 3.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	63.975.600	63.975.600	0	0
5.2.3.17.0 4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	9.314.438.000	1.229.438.000	(8.085.000.000)	(87)
5.2.3.17.0 5.	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	31.200.000	31.200.000	0	0

Disy. Perundangan

Ket. 1

6

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.17.0 6.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	595.365.700	595.365.700	0	0
5.2.3.17.0 7.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	31.900.000	31.900.000	0	0
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.262.177.100	12.202.177.100	(60.000.000)	0
5.2.3.18.0 1.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	3.669.345.000	3.609.345.000	(60.000.000)	(2)
5.2.3.18.0 2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	54.709.000	54.709.000	0	0
5.2.3.18.0 3.	Belanja modal pengadaan Personal Komputer	5.078.787.400	5.078.787.400	0	0
5.2.3.18.0 4.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.240.618.000	1.240.618.000	0	0
5.2.3.18.0 5.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	391.850.000	391.850.000	0	0
5.2.3.18.0 6.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	1.297.667.700	1.297.667.700	0	0
5.2.3.18.0 7.	Belanja Modal Pengadaan Program/aplikasi/software/operating system	529.200.000	529.200.000	0	0
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.447.745.600	2.447.745.600	0	0
5.2.3.19.0 1.	Belanja modal pengadaan Meja Kerja Pejabat	32.868.300	32.868.300	0	0
5.2.3.19.0 2.	Belanja modal pengadaan Meja Rapat Pejabat	104.150.000	104.150.000	0	0
5.2.3.19.0 3.	Belanja modal pengadaan Kursi Kerja Pejabat	133.972.900	133.972.900	0	0
5.2.3.19.0 4.	Belanja modal pengadaan Kursi Rapat Pejabat	74.650.000	74.650.000	0	0
5.2.3.19.0 5.	Belanja modal pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.500.000	1.500.000	0	0
5.2.3.19.0 6.	Belanja modal pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	43.905.000	43.905.000	0	0
5.2.3.19.0 7.	Belanja modal pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	51.995.000	51.995.000	0	0
5.2.3.19.0 8.	Belanja modal pengadaan Meja Kerja Non Eselon	1.039.683.800	1.039.683.800	0	0
5.2.3.19.0 9.	Belanja modal pengadaan Kursi Kerja Non Eselon	965.020.600	965.020.600	0	0
5.2.3.20.	Belanja modal pengadaan Alat Studio	3.052.146.900	2.999.396.900	(52.750.000)	(2)
5.2.3.20.0 1.	Belanja modal pengadaan Peralatan Studio Visual	3.011.496.900	2.958.746.900	(52.750.000)	(2)
5.2.3.20.0 2.	Belanja modal pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	40.650.000	40.650.000	0	0
5.2.3.21.	Belanja modal pengadaan Alat Komunikasi	186.345.000	186.345.000	0	0
5.2.3.21.0 1.	Belanja modal pengadaan Alat Komunikasi Telephone	171.345.000	171.345.000	0	0
5.2.3.21.0 3.	Belanja modal pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	7.500.000	7.500.000	0	0
5.2.3.21.0 4.	Belanja modal pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	7.500.000	7.500.000	0	0

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	35.450.508.544	34.247.308.544	(1.203.200.000)	(3)
5.2.3.23.0	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	13.998.100.307	12.794.900.307	(1.203.200.000)	(9)
1.	Umum				
5.2.3.23.0	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	1.144.985.000	1.144.985.000	0	0
2.					
5.2.3.23.0	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	833.633.289	833.633.289	0	0
5.	T.H.T				
5.2.3.23.0	Belanja Modal Pengadaan Alat Farmasi	151.413.950	151.413.950	0	0
7.					
5.2.3.23.0	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	5.373.379.623	5.373.379.623	0	0
8.	Bedah				
5.2.3.23.0	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	553.150.000	553.150.000	0	0
9.	Kebidanan dan Penyakit kandungan				
5.2.3.23.1	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	197.283.138	197.283.138	0	0
2.	Anak				
5.2.3.23.1	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	1.003.020.000	1.003.020.000	0	0
5.	Neurologi (Syaraf)				
5.2.3.23.1	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	8.463.027.237	8.463.027.237	0	0
6.	Jantung				
5.2.3.23.1	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	3.729.366.000	3.729.366.000	0	0
8.	Radiologi				
5.2.3.23.2	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	3.150.000	3.150.000	0	0
1.	Jiwa				
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	898.307.972	898.307.972	0	0
5.2.3.24.0	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	581.077.972	581.077.972	0	0
1.	Perawatan				
5.2.3.24.0	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	317.230.000	317.230.000	0	0
2.	Rehabilitasi Medis				
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Unit-unit	1.902.600.000	1.902.600.000	0	0
	Laboratorium				
5.2.3.25.0	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	1.253.150.000	1.253.150.000	0	0
2.	Microbiologi				
5.2.3.25.1	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	3.150.000	3.150.000	0	0
6.	Kimia				
5.2.3.25.1	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	646.300.000	646.300.000	0	0
8.	Patologi				
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Alat	582.520.500	582.520.500	0	0
	Peraga/Praktek Sekolah				
5.2.3.26.1	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek	582.520.500	582.520.500	0	0
3.	Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain				
5.2.3.37.	Belanja modal pengadaan Alat Keamanan	267.000.000	267.000.000	0	0
	dan Perlindungan				
5.2.3.37.0	Belanja Modal Pengadaan Alat bantu	267.000.000	267.000.000	0	0
1.	Keamanan				
5.2.3.38.	Belanja modal Pengadaan Bangunan	64.771.982.400	63.821.998.873	(949.983.527)	(1)
	Gedung Tempat Kerja				
5.2.3.38.0	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	18.188.120.400	18.188.120.400	0	0
1.	Kantor				
5.2.3.38.0	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	175.850.000	175.850.000	0	0
4.	Instalasi				

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	300.000.000.000	300.000.000.000	0	0
6.1.1.04.0 1.	Belanja pegawai dari belanja tidak langsung	254.096.606.682	254.096.606.682	0	0
6.1.1.04.0 3.	Belanja barang dan jasa	16.857.685.418	16.857.685.418	0	0
6.1.1.04.0 4.	Belanja modal	26.579.396.324	26.579.396.324	0	0
6.1.1.04.1 2.	Belanja dana JKN	2.466.311.576	2.466.311.576	0	0
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	35.492.001.620	35.492.001.620	0	0
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan	35.492.001.620	35.492.001.620	0	0
6.1.2.01.0 1.	Pencairan Dana Cadangan Pilkada	35.492.001.620	35.492.001.620	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	335.492.001.620	335.492.001.620	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETO	335.492.001.620	335.492.001.620	0	0
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	0	0

Walikota Banjarmasin


IBNU SINA